



## TRANSPARANSI TANPA MAKNA

**S**mart City hadir menjadi bagian dari pemecahan masalah di perkotaan. Identik dengan sebutan bagi kota yang memanfaatkan TIK yang memungkinkan infrastruktur penting, komponen dan fasilitas didalamnya berfungsi interaktif, efisien, yang pada akhirnya warga kota menyadari arti penting keberadaan TIK. Sebuah Kota dapat dikategorikan “Smart” bilamana investasi di dalam sumber daya manusia, kehidupan sosial, dan infrastruktur komunikasinya dapat secara aktif menyokong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi termasuk didalamnya pengelolaan sumber daya alam melalui keikutsertaan pihak pemerintah. Surabaya sebagai salah satu kota yang menerapkan *Smart City* dengan berbagai penghargaan inovasi digital yang dimiliki tidak menjamin bahwa seluruh SKPD nya mampu memanfaatkan TIK secara maksimal untuk kepentingan publik. Seperti yang ditemui di lapangan, beberapa SKPD belum memiliki aplikasi berbasis digital bahkan tidak mengerti tujuan utama dibalik pembuatan aplikasi yang ada, salah satunya berada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Oleh karena itu, untuk mencapai “SMART CITY” dibutuhkan inovasi yang fokus pada : **a) potensi e-commerce, b) penguatan melalui konsep crowdsourced.**

### Latar Belakang

Berbagai instansi pemerintahan telah mengembangkan suatu inovasi yang berguna untuk meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Inovasi pelayanan dikembangkan dengan tujuan mendukung penggunaan TIK dalam rangka mencapai Smart City. Salah satu ciri khas dari Smart City adalah adanya program aplikasi digital pemerintahan yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat demi mempermudah kebutuhannya. Dalam era digital saat ini, Presiden Joko Widodo telah mengarahkan agar pemerintah Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Target itu sejalan dengan adanya dorongan perluasan akses digital di seluruh lapisan masyarakat tanah air.

Sehingga pelayanan pemerintah yang dikenal dengan kurangnya efisien dan efektif dari jam pelayanan operasional yang tidak sesuai, sarana prasarana kurang memadai, hingga pelayanan yang masih cenderung manual yang memakan waktu cukup lama dapat lebih ditingkatkan kembali kinerjanya melalui pengembangan aplikasi digital. Sebab, dengan sistem aplikasi digital yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat akan mempermudah untuk mendapatkan berbagai macam informasi pemerintahan terkait apa saja yang dibutuhkan dalam mengurus surat/dokumen atau dapat mengisi form yang diperlukan, dan saat sampai di kantor pemerintahan masyarakat hanya tinggal menyerahkan form sesuai kebutuhan dan tidak memakan waktu lama sehingga masyarakat dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari.

Salah satunya adalah Dinas Ketahanan Pangan yang memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses harga kebutuhan pangan atau “Informasi Harga Pokok” melalui website pemerintah ([surabaya.go.id](http://surabaya.go.id)). Dinas Ketahanan Pangan sendiri belum memiliki aplikasi digital karena dapat diketahui dinas ini tidak memberikan pelayanan secara langsung atau tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga untuk penerapan aplikasi berbasis digital belum dibuat untuk mendukung Surabaya Smart City. Keterbatasan Sumber Daya Manusia juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Smart City. Untuk menciptakan berbagai aplikasi digital dibutuhkan SDM yang memiliki kompetensi tinggi dan jumlah yang banyak. Banyak para pihak sektor privat yang menggunakan konsep crowdsourced untuk mencapai keberhasilannya. Konsep privat ini mampu digunakan untuk diterapkan pada sektor publik, khususnya untuk menangani masalah SDM.

Adanya update harga bahan pangan dilakukan setiap satu minggu sekali, hal ini dapat membantu masyarakat dalam melakukan perencanaan pembelanjaan sebelum membeli bahan sembako/ pangan dan menyesuaikan standar harga yang terdapat di website pemerintah dengan harga di pasaran. Contoh harga cabai yang kadang melonjak dapat disesuaikan dengan harga website agar dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat dapat menjadi lebih irit. Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Perusahaan Dagang milik daerah yakni PD.Pasar Surya dalam survey harga pokok ke pasar-pasar tertentu untuk menentukan update daftar harga pokok tersebut. Dengan adanya “Update Harga Pokok” pemerintah memberikan informasi pada masyarakat terutama Ibu-Ibu yang sering pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pangan.

Tujuannya adalah agar masyarakat dapat lebih memanfaatkan internet untuk mengupdate informasi-informasi yang ada di website pemerintah. Dapat diharapkan bahwa segala informasi Dinas Ketahanan Pangan dapat diakses melalui aplikasi digital yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Sehingga masyarakat lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya termasuk prioritas kenyamanannya. Kinerja Dinas Ketahanan Pangan sendiri pun dapat lebih meningkat dalam melaksanakan inovasi program-program baru yang ditujukan untuk masyarakat. Perlu adanya inisiatif dari tiap instansi untuk lebih berkembang dalam memberikan program yang inovatif, sehingga aplikasi digital bukan lagi menjadi suatu formatif dalam melaksanakan apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

### Temuan – Temuan Pokok

1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya memiliki sebuah inovasi baru, yakni berupa keterbukaan informasi harga bahan-bahan pokok yang terdapat di lima pasar di Kota Surabaya. Pasar-pasar tersebut yakni Pasar Tambakrejo, Pasar Pucang Anom, Pasar Wonokromo, Pasar Genteng Baru, dan Pasar Pabean.
2. Tidak ada kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan pihak swasta, seperti toko-toko ritel maupun dengan pihak *e-commerce*. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian hanya bekerja sama dengan PD Pasar Surya. Sebab, PD Pasar Surya yang terjun langsung ke para pedagang untuk mendapatkan harga-harga bahan pokok. Kemudian untuk mempublikasikan informasi harga merupakan kewenangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
3. Harga yang diunggah di website [www.surabaya.go.id](http://www.surabaya.go.id) merupakan harga mentah yang didapatkan dari PD Pasar Surya dan tidak diolah kembali oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Harga bahan-bahan pokok tersebut, menurut Bapak Oktav selaku Seksi Ketahanan Pangan di Bidang Pangan untuk memudahkan ibu-ibu yang akan belanja di pasar. Dengan melihat harga tersebut, ibu-ibu bisa membuat perencanaan anggaran belanja.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya hanya membuat Laporan Monitoring Ketersediaan dan Distribusi Pangan setiap bulannya, yang kemudian diberikan kepada WaliKota Surabaya sebagai bentuk akuntabilitas atas tugas pokok fungsi yang ada.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya belum memiliki sistem pelayanan secara *online* kepada masyarakat. Hanya sekedar transparansi informasi harga bahan pokok saja. Sistem pelayanan akan segera dikembangkan, sebab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki tupoksi untuk membantu dan menjaga stabilitas harga bahan pokok saja agar tidak terjadi inflasi serta menjadi wadah antara penjual dan pembeli.
6. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian hanya dilakukan jika ada PKK di Kota Surabaya yang membutuhkan. Dengan materi yaitu diservikasi (kesetaraan pangan, misalnya beras diganti dengan jagung), ketersediaan (manajemen cadangan pangan), dan keamanan (bagaimana mengetahui ciri-ciri daging yang sehat, karena saat ini sudah banyak daging impor).
7. Untuk masalah aplikasi *online*, Kepala Bidang Ketahanan Pangan sudah memikirkan untuk membuatnya. Namun, hanya berupa kondisi pasar, gambaran pasar, konsultasi pertanian, informasi UKM yang terdapat di Kota Surabaya dan hal lainnya yang tidak bersifat transaksi. Karena belanja *online* adalah wewenang Disperindag.



Konsumsi Pangan Bergizi,  
Beragam, Seimbang,  
Aman dan Halal

## Rekomendasi Kebijakan

Memasuki era *digital city*, pemerintah sebagai fasilitator dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya harus segera mengembangkan berbagai alternatif kebijakan maupun inovasi pelayanan publik. Penggunaan TIK sudah tersebar diseluruh penjuru dunia. Namun tidak memungkiri keberadaannya mampu memberikan *impact* yang positif terhadap sekitarnya. Banyak aplikasi *online*, pelayanan publik berbasis *online*, perdagangan online dimana penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka namun dapat melakukan transaksi. Ini adalah era dimana digitalisasi mendominasi semua hal yang ada. Salah satunya *e-commerce*. *E-commerce* merupakan bentuk perdagangan elektronik dimana di dalamnya terdapat aktivitas yang berkaitan dengan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau tv, atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dipandang memiliki potensi yang sangat tinggi untuk dapat memberikan keuntungan bagi penggunanya. Dengan waktu nya singkat dan efektif, semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan mudah. Oleh karena itu, sekarang sudah banyak masyarakat yang memanfaatkan *E-commerce* ini.

### 1. Potensi E-Commerce

Sebagai bentuk pemecahan solusi, *e-commerce* dipandang berpotensi untuk membantu menangani permasalahan yang ada terkait dengan peningkatan pasokan pangan di Kota Surabaya dan dalam rangka memenuhi prasyarat untuk membantu Kota Surabaya mewujudkan Smart City nya. Arti lain dari *E-commerce* yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pengolah digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah dan mendefinisikan kembali hubungan yang baru antara penjual dan pembeli. *E-commerce* dianggap penulis relevan untuk diterapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan cara, Dinas ketahanan pangan menjalin kerjasama dengan pihak *E-commerce* tertentu, yang didalamnya Dinas akan mendapatkan sebuah lapak khusus yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin menjual komoditas bahan-bahan pokok. Ketika lapak tersedia, akses pun juga harus dibuka dan sosialisasi secara terus-menerus dilakukan. Ketika sebagian besar masyarakat menggunakan, dua tujuan tercapai sekaligus. Pertama dengan kemudahan transaksi jual beli komoditas bahan pokok, maka dapat dipastikan ketahanan pangan akan meningkat. Kedua, pemerintah akan dengan mudah mencapai Smart City.

### 2. Konsep Crowdsourced

*Konsep Crowdsourced* dapat dijadikan sebagai solusinya atas permasalahan pendanaan maupun SDM. Konsep yang diambil dari sektor privat ini sangat cocok untuk diterapkan dalam ranah publik, karena dengan konsep ini, Dinas Ketahanan Pangan mampu memiliki SDM yang banyak sebagai sumber penggerak sektor dari ketahanan pangan itu sendiri dalam rangka meningkatkan produktivitas atas pangan dan memenuhi persyaratan akan digitalisasi. *Crowdsourced* merupakan istilah yang digunakan untuk

*E-commerce* ini erat kaitannya dengan unsur market place yang merupakan sebuah lokasi jual beli produk dimana pembeli dan penjual bertemu di suatu tempat. Penjual akan menjual barangnya di lapak yang sudah disediakan oleh *e-commerce* dengan konsep market place. Disini penulis memberikan rekomendasi kepada dinas ketahanan pangan untuk menggunakan *e-commerce* sebagai wadah pemasaran komoditas bahan pokok. Pedagang kecil yang menjual komoditas, pemilik UMKM yang berjualan bahan pokok atau hasil olahan dari bahan pangan yang akan diberi fasilitas oleh dinas untuk menjadi pedagang online (*e-commerce*). Pemerintah harus menjalin kerjasama dengan salah satu pihak *e-commerce* untuk menyediakan lapak (*market place*) bagi pedagang-pedagang yang direkomendasikan atau dipilih oleh dinas. Disini *e-commerce* berfungsi sebagai fasilitator untuk mempermudah pedagang dalam memasarkan produk mereka secara online. Setelah kerjasama dijalin, pihak *e-commerce* harus memberikan informasi kepada pedagang online dan pelanggan (*customer*) agar masyarakat dapat mengakses dan mengetahui proses jual-beli. Bentuk inovasi pelayanan seperti ini, dianggap penulis mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi dinas.

mendeskripsikan proses mendapatkan pekerjaan atau pendanaan dari sekelompok besar orang dalam ranah *online*. Jadi *crowdsourced* merupakan sebuah kegiatan untuk mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi kepada sebuah grup yang besar dan tak terkira yang disebut dengan komunitas. Jadi dengan konsep ini, pemerintah mampu mendapatkan sumber daya di luar organisasi baik dari LSM maupun komunitas masyarakat lainnya yang

membantu Dinas Ketahanan pangan untuk meningkatkan produktivitas pangan dengan efisiensi biaya. Cara menggunakan konsep bisa dalam rangka mengenalkan bahan komoditi yang memiliki kualitas tinggi melalui pedagang ritel yang ada. Jadi Dinas Ketahanan Pangan secara teknis membuat suatu aplikasi digital, dimana

didalamnya aplikasi ini dibuat untuk memasarkan bahan-bahan komoditi baik yang belum terolah sampai yang sudah tersaji. Didalam aplikasi ini, *user* adalah pemeran utama untuk meningkatkan produktivitas pangan melalui pemasaran tersebut, inilah yang disebut dengan konsep *crowdsourced*.

### Limited Research



Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya untuk mendapatkan informasi seputar transparansi harga pokok yang berlaku di masyarakat ini mengalami ketidakpastian informan. Yang mana untuk pembuatan informasi harga bahan pokok tersebut tidak menjadi kewenangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, melainkan terkait dengan PD Pasar Surya dan Tim Teknis dari setiap Pasar di Surabaya. Sehingga peneliti tidak mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana cara harga bahan pokok itu didapatkan, bagaimana teknis pengumpulan informasi terkait harga bahan pokok dilapangan, sejauh mana peran SKPD dan Perusahaan Daerah (PD) dalam melakukan kerjasama dalam hal pembuatan informasi harga bahan pokok, dan bagaimana cara PD. Pasar Surya mengolah harga hingga mampu menentukan rata-rata harga. Jadi Penulis disini hanya bisa memberikan informasi terkait tidak ada kerjasama yang dijalin pihak Pemerintah dengan pihak Swasta, tugas pokok fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian hanya sekedar menganalisis, dan tidak mempublikasi harga bahan pokok yang ada di website maupun mencari data dilapangan, namun terkait dengan penjelasan detail mengenai mengapa informasi harga bahan pokok dibuat, apa tujuan dibalik pembuatan, dan bagaimana teknisnya tidak dapat kami dapatkan dalam penelitian ke lapangan yang telah dilakukan. Peneliti tidak dapat mengakses informasi yang dibutuhkan di PD.Pasar Surya dan tidak dapat menemui tim teknis yang menangani pembaharuan harga sembako, sehingga informasi yang didapatkan peneliti tidak berdasarkan dari *key informan* tetapi hanya melalui akses informasi biasa.

### Referensi

- Widyaningsih, Dwita. 2013. *Kota Surabaya Menuju Smart City*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada  
Website:  
Alexander, Peter. 2011. Crowdsourcing dalam Pembelajaran, Sebuah Introduksi. Diakses dari [staff.blog.ui.ac.id](http://staff.blog.ui.ac.id) , pada 22 Juni 2017 pukul 15.45  
Daftar Harga Bahan Pokok diakses dari [www.surabaya.go.id](http://www.surabaya.go.id) , pada 22 Juni 2017 pukul 15.46  
Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 diakses pada 22 Juni 2017 pukul 15.30  
[www.pengertianku.net](http://www.pengertianku.net) , diakses pada 22 Juni 2017 pukul 15.45

SEPTIAN RIO B	{071311133066}	VONIE YENI P	{071411131004}
BELLA PRISTI	{071411131041}	WINDA R	{071411131033}
LINA MARIA	{071411131018}	SAVIRA P ANRIZA	{071411131011}
BUNGA YULI	{071311333053}	ANDHIKA P	{071311333023}
BAGUS PUTRA N	{071311333096}	CHARIS EDO F	{071411131025}